DR. FAHRI BACHMID, S.H.,M.H.

(Advokat & Dosen Hukum Tata Negara/ Konstitusi
dan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia)

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap	**: DR. FAHRI BACHMID, S.H.,M.H.**
Pangkat	: IIId
Golongan/Ruang	: IIId
NIPs	: 10420 1557
NIDN	: 1229087701
Jabatan Fungsional	: Lektor
Unit Kerja	: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat/Tanggal Lahir	: Waimangit / 29 Agustus 1977
Status	: Kawin
Nama Isteri	: dr.Syamsila Mona Rumata
Anak	:

1. Fahna Adzra Farizah Bachmid
2. Nadra Feyza Thafana Bachmid
3. M. Farras Al-Farizi Bachmid
4. Faiqah Varisha Syafiqah Bachmid

Nama Ibu	: Sehat Bachmid
Nama Ayah	: Umar Bachmid
Pekerjaan	:

- Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
- Advokat

Alamat Kantor : LAW FIRM DR. FAHRI BACHMID, S.H.,M.H & ASSOCIATES, GEDUNG JAYA Lt. 5 Unit A6 Jl. M.H. Thamrin No.12, Kb. Sirih, Menteng Kota Jakarta Pusat, dan kantor cabang di Jl AM Sangadji Nomor 77 Kota Ambon, Maluku – Indonesia.

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- SD Al-Hilal Waimangit, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Tahun 1991;
- SMP Negeri 1 Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Tahun 1994;
- SMU Tarbiyah Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Tahun 1997;
- SMU Negeri 2 Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Tahun 1998;
- S1 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Tahun 2004;
- S2 Program Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Tahun 2009;
- S3 Program Pascasarjana Doktoral Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Tahun 2019.

PENGHARGAAN

- Mahasiswa Berprestasi/Lulusan terbaik Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara pada Wisuda Periode I Tahun 2019 Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, tanggal 15 Juni 2019, dengan IPK 3,98 dan lama studi 30 bulan 2 hari.

BIDANG KEAHLIAN DAN KEPAKARAN
Pakar Hukum Tata Negara
PENGALAMAN KEPAKARAN SEBAGAI AHLI DIBERBAGAI FORUM PERSIDANGAN DI PENGADILAN, KHUSUSNYA DIBIDANG KONSTITUSI & KETATANEGARAAN

- Memberikan Keterangan Ahli secara Tertulis (Affidavit) pada persidangan Peninjauan Kembali Ke-2 perihal pengajuan Kontra Memori, yang dihadirkan Termohon Ihza & Ihza Law Firm Bali Office selaku Kuasa PT. Asuransi Ramayana atas putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 731 PK/PDT/2018, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,Tahun 2019;
- Memberikan Keterangan Ahli pada perkara Judicial Review No. 60/P/HUM/ 2020, yang dihadirkan Kuasa Hukum Induk Koperasi Kepolisian Negara RI (INKOPPOL) di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Oktober Tahun 2020;
- Memberikan Keterangan Ahli pada tingkat Penyidikan di Kejaksaan Negeri Belitung Timur Sehubungan dengan pelaporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2020, yang dihadirkan oleh Divisi Advokasi Tim Pemenangan Koalisi Partai Politik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur (Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H. dan Nurdiansyah) yang teregister dengan No. 03/Reg/LP/PB/Kab/09.07/XI/2020 di Bawaslu Kab. Belitung Timur melalui Media Daring;
- Memberikan Keterangan Ahli dalam persidangan Perkara No. 174/ Pid.Sus/2020/PN.Tdn. atas nama terdakwa Syarifah Amelia Als Amel Binti Akhmad Satiri, sehubungan dengan Tindak Pidana Khusus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan;
- Diundang Sebagai Narasumber Ahli Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Konstitusi, Tentang Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, yang diselenggarakan secara Daring, 30 Oktober – 08 November 2020 oleh Center For The Study Of Religion End Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI);
- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Praperadilan dalam Perkara Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Amb, di Pengadilan Negeri Ambon, yang dihadirkan oleh Negara Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung RI, Cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, Tanggal 26 Februari 2021;
- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Praperadilan dalam Perkara Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Nomor : 3/Pid. Pra/2021/PN.Tte, di Pengadilan Negeri Ternate, yang dihadirkan oleh Negara

www.fahribachmid.com

Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung RI, Cq. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Tanggal 16 April 2021;

- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Sengketa Tata Usaha Negara antara Rahman Ismail (Penggugat) melawan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Tergugat) berdasarkan Register Perkara Nomor: 46/G/2021/PTUN.JKT; di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- Diundang Sebagai Ahli Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Konstitusi, oleh Menteri Dalam Negeri dalam rangka memberikan pendapat dan analisis hukum sekaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021, terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Pasca Penghitungan Ulang Surat Suara, yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2021;
  - Memberikan Keterangan Ahli dalam perkara Permohonan Keberatan Pengujian Formiil dan Permohonan Keberatan Pengujian Materill atas Pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, di Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc. dari Ihza & Ihza Law Firm berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2021);
  - Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Pra Peradilan dalam Perkara Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Nomor : 4/Pid. Pra/2021/PN.Tob, di Pengadilan Negeri Tobelo, yang dihadirkan oleh Negara Republk Indonesia Cq. Kejaksaan Agung RI, Cq. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Tanggal 02 September 2021;
- Diundang Sebagai Narasumber Ahli Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Konstitusi, oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dalam rangka memberikan pendapat dan analisis hukum sekaitan dengan Permasalahan Usul Pemberhentian Sdr. James Arthur Kojongian, ST, MM sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2021;
- Memberikan Keterangan Ahli dalam Perkara Permohonan Keberatan Pengujian Formil dan Materiil Terhadap Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia di Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc. dari Ihzan & Ihza Law Firm;
- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Register Perkara Nomor: 101/G/2021/PTUN-BDG, di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H.,M.H. CPCLE.CPA dari Law Firm DSW & Partner, tanggal 06 Januari 2022;
- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Register Perkara Nomor: 31/G/2021/PTUN-ABN, di Pengadilan Tata Usaha Negara

www.fahribachmid.com

Ambon, tanggal 18 Januari 2022. dengan obyek perkara, Keputusan Walikota Ternate Nomor: 800/2582/2021 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2021;

- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Pra Peradilan dalam Perkara Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Perkara Nomor : 1/Pid. Pra/2022/PN.Sos, Tidore, di Pengadilan Negeri Soasio, yang dihadirkan oleh Negara Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung RI, Cq. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Cq. Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, Tanggal 18 Februari 2022;
- Diundang Sebagai Narasumber Ahli Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Konstitusi, oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dalam rangka memberikan pendapat dan analisis hukum sekaitan dengan Uji Materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2022);
- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan perkara Nomor : 10/Pid.Sus/2022/PN.Tte, atas nama Terdakwa Rani Andini Yasa, pada Pengadilan Negeri Ternate, yang dihadirkan oleh Kantor Hukum MTM & Associates. Ternate, 22 Maret 2022;
- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Palembang. Rabu, 13 April 2022, yang dihadirkan oleh:
- Irfan Maulana Muharam, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang, berdasarkan Register Perkara No. 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 07 Januari 2022, atas nama Terdakwa Subahan;
  - Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H., C.Med, Advokat dan Konsultan Hukum pada DR. DARMADI DJUFRI LAW FIRM, berdasarkan Register Perkara No. 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 07 Januari 2022, atas nama Terdakwa Indra Gani, Mardiansyah, Fitriyanzah dan Muhardi;
  - M. HUSNI CHANDRA, SH., M.HUM, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Husni Chandra & Rekan, berdasarkan Register Perkara No. 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 07 Januari 2022, atas nama Terdakwa Piardi, Marsito, dan Ari Yoca Setiaji;
  - Feni Sasriana, S.H Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor Feni Sasriana.SH dan Rekan, berdasarkan Register Perkara No. 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 07 Januari 2022, atas nama Terdakwa Ahmad Rio Kesuma;
  - Agus Mirantawan, SH; dan Nurlailatul Qodar Gathmir, SH, Advokat pada Kantor Hukum SAMUDERA, Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan Register Perkara No. 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 07 Januari 2022, atas nama Terdakwa Ishak Joharsah.
- Memberikan keterangan sebagai Ahli Presiden-RI dalam Perkara No.47/PUU-XIX/2021, terkait Uji Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indoensia Tahun 1945, di Mahkamah

www.fahribachmid.com

Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta, 17 Mei 2022;

- Memberikan keterangan sebagai Ahli Pemohon yang dihadirkan oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H.,M.M. dalam Perkara Nomor: 63/PUU-XIX/2021, terkait Judicial Review UU RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 14 Juni 2022;
- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Register Perkara Nomor: 67/G/2022/PTUN.JKT, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 13 Juli 2022, yang dihadirkan oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H.,M.M.
- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, Senin, 12 September 2022, yang dihadirkan oleh Achmad R Hamzah, S.H.,MKn. Advokat pada Kantor Hukum Imran Dedy Irwan & Partners Law Firm, berdasarkan register perkara nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2022/PN.MKS atas nama Terdakwa Burhanuddin dan register perkara nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.MKS, atas nama Tedakwa Anwar;
- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Perkara Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 15 September 2022, yang dihadirkan oleh TIM KUASA HUKUM DRS. DIDI ANGGA, ANG, berdasarkan register perkara nomor: 74/Pid.Pra/2022/PN.Jkt.Sel;
- Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam Perkara Permohonan Pengujian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP terhadap Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik lndonesia berdasarkan Register Perkara Nomor: 61/PUU-XX/2022, yang dihadirkan oleh Perhimpunan Advokat lndonesia (PERADI) di bawah Pimpinan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dan Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku Pihak Terkait. Jakarta, 10 Oktober 2022;
- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Register Perkara Nomor: 23 /G/ 2022/ PTUN. ABN, di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tanggal 24 Oktober 2022, yang dihadirkan oleh LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH., MH & ASSOCIATES;
- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan register perkara nomor: 334/G/ TF/2022/PTUN.JKT., di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Selasa,10Januari2023, yang dihadirkan oleh Kantor Hukum MUHAMMADRULLYANDI PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM;
- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Perkara Pidana berdasarkan Register Perkara Nomor: 357 / Pid.B/ 2022/PN.Pal, di Pengadilan Negeri Palu, yang dihadirkan oleh Kantor Hukum "OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES";
- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Pra Peradilan dalam Perkara Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Perkara Nomor: 3/Pid.Pra/2023/PN.Amb di Pengadilan NegeriAmbon, yang dihadirkan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku, Tanggal 27 Februari 2023;
- Memberikan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana Nomor: 117/Pid.Sus/2023/PN.Sdr. di Pengadilan Negeri Sidenreng

www.fahribachmid.com

Rappang, yang dihadirkan oleh Advokat Dan Konsultan Hukum SCS Law Office, selaku kuasa hukum Terdakwa, Tanggal 20 Juli 2023;

- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Nomor Registrasi Perkara : 355/G/2023/PTUN.JKT, yang dihadirkan oleh VST And Partners Advocates & Legal Consultan selaku Penggugat. (Senin, 23 Oktober 2023);
- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara terkait Perbuatan Melawan Hukum oleh Jaksa Agung RI, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Nomor Registrasi Perkara : 346/G/TF/2023/PTUN.JKT, yang dihadirkan oleh VST And Partners Advocates & Legal Consultan selaku Penggugat. (Selasa, 7 November 2023);
- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor Registrasi Perkara : 1350/G.Pdt/2022/PN.Tng, yang diajukan oleh Law Office Era Marzuki & Partners, Advocates And Legal Consultants selaku Penggugat, (Kamis, 14 Desember 2023);
- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Registrasi Perkara : 374/G/2023/PTUN.JKT, yang diajukan oleh Kantor Hukum Benny Wullur & Associates Law Firm, selaku Penggugat, (Selasa, 05 Desember 2023);
- Memberikan Keterangan Ahli pada persidangan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor Registrasi Perkara : 29/G/2023/PTUN.JYPR, yang diajukan oleh Gubernur Papua Selatan selaku pihak Tergugat, (Senin, 4 Maret 2024).

RIWAYAT PEKERJAAN

Akademisi

- ✓ Dosen Tetap Fakultas Hukum UMI Makassar, Tahun 2020 – Sekarang, dengan konsentrasi mengajar pada Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi dan Hukum Administrasi Negara;
- ✓ Dosen Tidak Tetap Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam As - Syafi'iyah Jakarta 2020 – Sekarang;
- ✓ Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum IAIN Ambon - Maluku, 2017 – Sekarang.

Law Firm

Managing Director (Owner And Founder) pada Law Firm Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. & Associates, Tahun 2008 – Sekarang.

Praktisi Hukum

- ✓ Kuasa Hukum Calon Presiden & Calon Wakil Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin perihal PHPU Calon Presiden & Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2019;

- ✓ Kuasa Hukum Partai Golkar perihal PHPU DPR-DPRD Provinsi Maluku di Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2019;
- ✓ Kuasa Hukum Pihak Terkait Partai Bulan Bintang, dalam sengketa perkara Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi berdasarkan register perkara No. 114/PUU-XX/2022, Perihal Pengujian Materil UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- ✓ Kuasa Hukum Calon Presiden & Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perihal Sengketa Pilpres (PHPU) di Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2024.

RIWAYAT ORGANISASI

❖ Organisasi Profesi/Ilmiah

- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI);
- Muhammadiyah;
- Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI;
- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI);
- Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara/ Association of Constitutional and Administrative Law Lecturers of Indonesia (APHTN-HAN);
- Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (A D H I);
- Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA);
- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah konstitusi (APHAMK);
- Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI);
- Perkumpulan Ahli Dan Dosen Republik Indonesia (ADRI).;
- Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (PEMUDA ICMI).

❖ Struktur Organisasi

- Wakil Ketua Bidang Kajian Hukum Dan Perundang-undangan, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), Masa Jabatan 2020 – 2025;
- Direktur LBH PW. Muhammadiyah Maluku Periode 2020-2025;
- Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MUI Kota Ambon, Tahun 2019 – 2022
- Majelis Hukum dan HAM PW. Muhammadiyah Maluku, Tahun 2011-2015;
- Ketua Umum FORPEMIB Makassar, Tahun 2003 – 2005;
- Wakil Ketua PBHI Sulawesi Selatan, Tahun 2003 – 2005;
- Ketua DPC PERADI Ambon – Maluku, Tahun 2017 – 2022;
- Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PW. Muhammadiyah Maluku, Tahun 2016 – 2020;
- Sekretaris DPC PERADI Ambon- Maluku, Tahun 2014 – 2018;
- Pengurus HMI Komisariat Hukum UMI Makassar, Tahun 2002 – 2003;
- Sekjen BEM FH UMI Makassar, Tahun 2001 – 2003;
- Sekjen FORPEMIB Makassar, Tahun 2001 –2003;

- Koordinator Departemen Ekonomi Politik Dan Hukum, Majelis Rayon Universitas Muslim Indonesia KAHMI Kota Makassar masa bakti 2021-2026;
- Ketua Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2019-2024;
- Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi & Pemerintahan (PaKem) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (Center of Constitutional and Governance Studies, Faculty of Law, Moslem University Of Indonesia), Sejak 27 April 2022 sampai-sekarang;
- Majelis Pakar Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (PEMUDA ICMI) Periode 2021-2026;
- Penjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang sejak 2024 s/d akhir Januari 2025.

SEMINAR, TRAINING PROFESIONAL & FGD

- BIMTEK Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Tahun 2019;
- BIMTEK Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP) Gubernur, Tahun 2018;
- BIMTEK Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP) Bupati, Tahun 2016;
- Seminar Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kepulauan, Tahun 2012;
- Seminar Tantangan dan Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Tahun 2011;
- Seminar dan Loka Karya 4 (empat) Pilar Kebangsaan, Tahun 2011;
- Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Tahun 2005;
- Training Investigasi HAM PBHI Sulawesi Selatan, Tahun 2003;
- Training Kemahiran Hukum Tingkat Nasional ISMAHI Pusat,Tahun 2000;
- Basic Training HMI Komisariat Hukum UMI Makassar, Tahun1999;
- BIMTEK Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP) Bupati, Tahun 2016;
- Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK), Tahun 2021;
- Peserta Pelatihan Applied Approach, Angkatan X Yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Tanggal 10 s.d 14 Januari 2022;
- Peserta Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) Angkatan XIII Yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Tanggal 09 s.d 16 Agustus 2021;
- Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Pengurus dan Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selasa s.d. Jumat, 02 s.d. 05 Agustus 2022;
- Bimbingan Teknis Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara bagi Pengurus dan Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Senin s.d. Kamis, 05 s.d. 08 September 2022.

NARASUMBER

- Talk Show on Radio yang diselenggarakan oleh AMEKS FM dengan Terna: Pelanggaran dan Sengketa Pilkada Serentak 2020", 22 Oktober 2020;
- Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh PB Himpunan Mahasiswa Islam dengan Terna: "Revisi Undang- Undang Pilkada sebagai Upaya Perbaikan Kualitas Demokrasi di Indonesia", 29 Oktober 2019;
- Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Gelombang II yang diselenggarakan oleh DPC PERADI Ambon bekerjasama dengan IAIN Ambon, 21-28 November 2018;
- Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Gelombang I yang diselenggarakan oleh DPC PERADI Ambon bekerjasama dengan LBH KLINIK HUKUM Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 5-12 Mei 2018;
- Seminar Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Terna: "Netralitas ASN dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau dari Sistem Demokrasi Pancasila", 17 Oktober 2019;
- Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh PP Pemuda Muhammadiyah dengan Terna: "Panitia Seleksi dan Quo Vadis KPK RI", 29 Juni 2019;
- LIVE Diskusi yang disiarkan oleh MNC News dengan Terna: "TSM: Tunggu Sikap Mahkamah", 26 Juni 2019;
- LIVE Dialog yang disiarkan oleh Kabar Petang TV One dengan Terna: "Polemik Ma'ruf Diputusan MK", 25 Juni 2019;
- Seminar Pengenalan Profesi yang diselenggarakan oleh HMJ Akhwal As Syaksyiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dengan Terna: "Peluang Karier Lulusan Akhwal As Syaksyiyah di Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah", 12 Juni 2014;
- Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Gerakan Masyarakat Penjaga Konstitusi dengan Terna: "MK: Mahkamah Keadilan untuk Rakyat?", 24 Juni 2019;
- LIVE Diskusi yang disiarkan oleh iNews dengan Terna: "'AMUNISI' di Sidang Kedua", 17 Juni 2019;
- LIVE Diskusi yang disiarkan oleh iNews dengan Terna: "Pertarungan Terakhir di MK", 14 Juni 2019;
- Narasumber dalam FOCUS GROUP DISCUSSION dengan tema "Pengembangan Kebijakan Mahkamah Agung Terkait Mekanisme Pemeriksaan Hak Uji Materiil" yang diselenggarakan oleh Tim Peneliti dari Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, (tanggal 27 April 2021);
- Narasumber dalam Diskusi penerbitan tiga Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Hukum Acara, dengan Tema "Dinamika Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi" yang dilaksanakan oleh Assosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) Republik Indonesia, (Tanggal 7 Mei 2021);
- Narasumber dalam DIALEKTIK (Dialog Intelektual Sistemik) II, dengan tema : Presiden 3 Periode: "Antara Amanah Reformasi dan Amandemen Konstitusi" yang diselenggarakan oleh Madani Institute Center For Islamic Studies, (tanggal, 10 Juli 2021);
- Narasumber dalam FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENELITIAN, dengan tema : "Implementasi Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan dan PKPU Wilayah Pengadilan Niaga Makassar", yang diselenggarakan oleh Puslitbang Hukum & Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (tanggal, 12 Agustus 2021);
- Narasumber dalam Diskusi Publik Kaum Republik, dengan Tema "Babak Baru Partai Demokrat : Judicial Review

AD/ART Kepada Siapakah Ia Bertuan?" yang dilaksanakan oleh Republik Institute Freedom - justice - Rule Of Law, (Tanggal 30 September 2021);

- Narasumber dalam acara diskusi Ngaji Secangkir Kopi Bareng Bang Jurhum Khusus anak muda, malam mingguan produktif, dengan Tema "Pengujian AD/ART Partai Demokrat ke MA adalah 'Rule Breaking' dan orientasi PBB dalam membangun dan menata 'Sistem'. (Tanggal 09 Oktober 2021);
- Narasumber dalam Seminar Nasional dengan Terna: "Prospek Uji Formil & Materil AD-ART Partai Demokrat Di MA RI Apakah Suatu Rule Breaking?", yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, (Tanggal 14 Oktober 2021);
- Keynote Speaker dalam STUDIUM GENERALE, Sambut Mahasiswa Baru Universitas IQRA Buru Tahun Ajaran 2021-2022, dengan Tema : "Dinamika Hukum Tata Negara Kontemporer Di Era Disrupsi 4.0", (Tanggal, 06 September 2021);
- Narasumber dalam Sesi Lokakarya Nasional dengan Tema : Dilema Payung Hukum Kekerasan Seksual (Antara Pertarungan Ideologi dan Hak Asasi Manusia)" yang diselenggarakan oleh FORUM SILATURRAHIM Lembaga Dakwah Kampus Nasional (FSLDKN XX). (Tanggal, 27-31 Oktober 2021);
- Pemateri Tetap Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diadakan DPC IKADIN SERANG – BANTEN bekerja sama dengan Kampus STIH PAINAN Banten, sejak tahun 2020-sekarang;
- Narasumber dalam Seminar Nasional Dan Pelantikan DPN PERMAHI dengan Tema : "Cita Hukum Nasional Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia", yang diselenggarakan oleh DPN PERMAHI. (Tanggal, 15 November 2021);
- Narasumber dalam FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD), Kerja sama antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Universitas Muslim Indonesia (UMI), dengan tema : "Presidential Threshold Dan Ancaman Oligarki Pemecah Bangsa". (tanggal, 16 November 2021);
- Narasumber dalam Seminar Nasional Kebangsaan Muballigh Indonesia dengan Tema : "Mengokohkan Jatidiri Kebangsaan Muballigh Indonesia", yang diselenggarakan oleh DPP BAKOMUBIN bekerjasama dengan MPR-RI. (Tanggal, 19 Desember 2021);
- Pembicara dalam STUDIUM GENERALE dengan tema : "Mengapa Kita Harus Menolak PT 20%? Basis Konstitusi dan Presidensialisme", yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI). (Tanggal, 27 Januari 2022);
- Narasumber dalam Bacarita Hukum dengan tema : "Demokrasi di Persimpangan Jalan : Perihal Konsep Presidential Thresold 0%", yang diselenggarakan oleh Manado Legal Studies, Tanggal 13 Februari 2022;
- Pembedah dalam Monograph Launching Seri-2 dengan judul Buku : MASALAH HUKUM PEMILU Konsep dan Analisis Kasus, Karya: Dr. Radian Syam, S.H.,M.H. (Tanggal, 14 Februari 2022).
- Narasumber dalam FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENELITIAN, dengan topik makalah : "Reposisi Mahkamah Agung RI sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Yg Independen Dalam Rekruitmen Hakim", yang diselenggarakan oleh Puslitbang Hukum & Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Tanggal, 17 Februari 2022);
- Narasumber dalam Kuliah Umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan Tema: "Peradilan dan Budaya Digital Mahkamah Konstitusi RI". (Selasa, 1 Maret 2022);
- Narasumber dalam Ngobrol Virtual, Live: Tribun Timur, dengan tema : Penundaan Pemilu Konstitusional atau

Inkonstitusional. (Kamis, 3 Maret 2022);

- Pemateri pada Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar, dengan topik materi: "NKRI Kontemporer: Menelaah Problematika Ketatanegaraan Indonesia", yang diselenggarakan oleh Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Periode 2021-2022, (Jumat, 4 Maret 2022);
- Narasumber Webinar dengan tema: "Peran Inspektorat Mewujudkan Visi Pemerintah Sulawesi Selatan", yang diselenggarakan oleh Relawan Andi Amran Silaiman (RAAS) 2024, (Rabu, 16 Maret 2022);
- Narasumber Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM melalui Diskusi Daring Obrolan Peneliti (Opini), dengan tema: "Evaluasi Terhadap Sidang Online di Rumah Tahanan Negara", yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Barat. (Selasa, 29 Maret 2022);
- Narasumber Webinar dengan tema: "Menuai Polemik Usulan Pengunduran Pemilu 2024", yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Periode 2021-2023, (Rabu, 23 Maret 2022);
- Pembicara dalam Live Streaming Lidmi Media Center, dengan Tema : "Perwira TNI jadi Pejabat Kepala Daerah: Mencederai Reformasi, Demokrasi dan Inkonstitusional", yang diselenggarakan oleh LIDMI INTELECTUAL FORUM. (Kamis, 23 Juni 2022);
- Narasumber dalam Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 52/PUU-XX/2022, yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui kegiatan Executive Brief pada tanggal 14 Juli 2022 di Jakarta;
- Pemateri pada Pelatihan Dasar Bantuan Hukum (PDBH) Nasional, dengan topik materi: "Teori Konstitusi" yang diselenggarakan oleh Pengurus Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (Lkbhmi) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sorong periode 2021-2022. (19 Juli 2022-02 Agustus 2022);
- Narasumber dalam LIDMI INTELEKTUAL FORUM, dengan Tema: "Hakim MK Dipecat DPR : Upaya Melumpuhkan Independensi MK", yang diselenggarakan oleh Departemen Humas Dan Jaringan, Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia. (Jumat, 14 Oktober 2022);
- Narasumber dalam FESTIVAL HUKUM NASIONAL, dengan Tema: "Pengantar Hukum Tata Usaha Negara", yang diselenggarakan oleh Pinter Hukum. (01 Oktober 2022);
- Narasumber dalam BIMTEK Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Partai Bulan Bintang Se-Indonesia, dengan Topik "Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Tinjauan Undang-Undang Dasar 1945", yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, di Hotel Green Forest, Bogor, 11 Desember 2022;
- Bersama Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H. sebagai Pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PERADI, dengan Topik "Tinjauan Akademis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XX/2022", yang di selenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional PERADI, di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, 12 Desember 2022;
- Narasumber dalam Diskusi Hukum & Demokrasi, dengan tema: "Refleksi Hari Ham Internasional Realisasi Perpres 53/2021 : Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Di Ujung Tanduk Pemerintahan Jokowi", yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), Sabtu, 17 Desember 2022;

- Narasumber dalam Kajian Akhir Tahun, dengan Tema: "Toleransi: Perspektif Syariat dan Hukum di NKRI, Apakah Sejalan?", yang diselenggarakan oleh Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI PUSAT). (Selasa, 27 Desember 2022);
- Narasumber dalam LIDMI INTELECTUAL FORUM, dengan Tema: "Peppu No. 2 Tahun 2022 Ciptaker: Kudeta Terhadap konstitusi?" yang diselenggarakan oleh Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI PUSAT). (Rabu, 18 Januari 2023);
- Narasumber dalam NGOBROL PINTAS IKAJO SULSEL, dengan Tema: "Masa Depan Demokrasi Dalam Perspektif, Proporsional Terbuka VS Proporsional Tertutup" yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Jogjakarta Sulawesi Selatan. (Rabu, 18 Januari 2023);
- Narasumber dalam *LIVE* Diskusi *Prime Time News* dengan Tema " Menutup Jalan Sistem Pemilu Tertutup, Comblos Partai = Kemunduran, yang disiarkan oleh METRO TV, 27 Januari 2023;
- Narasumber dalam LIDMI INTELECTUAL FORUM, *(Live Streaming_Lidmi Media Center)* dengan Tema: "Masa Depan Demokrasi Indonesia: Sistem Proporsional Terbuka atau Tertutup" yang diselenggarakan oleh Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI PUSAT). (Rabu, 1 Februari 2023);
- Narasumber dalam Bincang Sudut Pandang, dengan Tema *"Ramai-ramai Tolak Penundaan Pemilu 2024",* yang diselenggarakan secara Live melalui kanal Youtube MQFM Jogja, oleh Radio MQ 92.3 FM. Manajemen Qolbu Jogja. (Sabtu, 04 Maret 2023);
- Narasumber dalam RAPIMNAS PERMAHI, Simposium Hukum Nasional dengan Tema *"Menyongsong Pembaharuan Hukum Dalam Kemajuan Teknologi Untuk membangun Indonesia Emas 2045",* yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Permahi. (06 Maret 2023) ;
- Narasumber dalam Diskusi Seputar Politik Dan Demokrasi (DISPOSISI), dengan tema *"Membongkar Operasi Penundaan Pemilu melalui PN Jakpus",* yang diselenggarakan oleh Progressive Democracy Watch (PRADEWA). (Selasa, 07 Maret 2023);
- Narasumber dalam Diskusi Hukum Nasional IV, dengan tema *"Masa Depan Demokrasi: Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup?,* yang diselenggarakan oleh Pinter Hukum, (15 Maret 2023);
- Narasumber dalam BIMTEK Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Partai Bulan Bintang Se-Indonesia, dengan Topik *"Eksisitensi Pembangunan Desa -Tinjauan UU Desa No. 6 Tahun 2014",* yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, di Menara Peninsula Hotel, Slipi, Jakarta Barat, 16 Maret 2023;
- Narasumber dalam Mata Lokal Memilih, dengan tema : *"Sistem Pemilu Proporsional Tertutup atau Terbuka"* yang diselenggarakan oleh Tribun Network, (Sabtu, 18 Maret 2023);
- Narasumber dalam FORUM IDI DISCUSSION WEEK, dengan tema "*Kajian : Ada Apa dengan Undang-Undang Organisasi Profesi Kesehatan yang Existing? Berjalan Baik atau Perlu Diganti?"* yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Ikatan Dokter Indonesia, (Sabtu, 15 April 2023);
- Narasumber dalam FORUM IDI DISCUSSION WEEK, dengan tema: "*Hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penyampaian Aspirasi sesuai Koridor Hukum".* yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Ikatan Dokter Indonesia, (Minggu, 16 April 2023);
- Narasumber dalam FORUM KOMUNIKASI IKATAN DOKTER INDONESIA, dengan Topic diskusi : "*Perlindungan Hukum Dalam RUU*

Kesehatan Omnibus Law Untuk Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Benarkah Ada?, yang diselenggarakan oleh FORUM KOMUNIKASI IKATAN DOKTER INDONESIA, (30 April 2023)

- Narasumber dalam Kegiatan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Sinergisitas Komisi Yudisial dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum "Upaya Pencegahan Perbuatan Anarkis di Persidangan dan Pengadilan" Tahun 2023. Tanggal 11 Mei 2023;
- Menjadi Narasumber Pro 3 RRI, dengan Topik diskusi : "*MK Harus bersiap Tangani Sengketa Hasil Pemilu Serentak 2024",* Kamis, 25 Mei 2023;
- Narasumber dalam SEMINAR NASIONAL, dengan tema: "*Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Merugikan Perekonomian Negara".* yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku, (Kamis, 13 Juli 2023);
- Narasumber dalam Bincang Sudut Pandang, dengan tema : "AMANDEMEN UUD UNTUK SIAPA?" Live : Youtube mqfmjogja, https://www.youtube.com/watch?v=gzos9YtHYGw (Sabtu, 12 Agustus 2023);
- Narasumber dalam LIDMI INTELECTUAL FORUM, *(Live Streaming_Lidmi Media Center)* dengan Tema: "Menuju Kursi Istana: Apa Nilai yang diperjuangkan" yang diselenggarakan oleh Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI PUSAT). (Minggu, 13 Agustus 2023);
- Narasumber dalam Diskusi Akhir Pekan, dengan tema : MAHKAMAH KONSTITUSI DAN USIA CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN, yang diselenggarakan oleh Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita. (Minggu, 27 Agustus 2023);
- Narasumber dalam Diskusi Publik, dengan tema : HARKAT, MARTABAT & KESELAMATAN SEORANG MANTAN PRESIDEN" (Jumat, 1 September 2023);
- Narasumber dalam BIMTEK Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Partai Bulan Bintang Se-Indonesia, dengan Topik *"Pemilu 2024 Perspektif Demokrasi dan Ketatanegaraan"*, yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, di Ballroom Swiss-Belresidences Kalibata Hotel, Jakarta Selatan. (Kamis, 28 September 2023;
- Narasumber dalam Rakornas Majelis Syuro dengan Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Bulan Bintang dengan tema *"Konsolidasi Pemenangan Pileg Dan Pilpres 2024 Capres Prabowo Subianto",* yang diselenggarakan oleh DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG MAJELIS SYURO di Hotel Luxury Inn Arion Rawamangun, Jakarta Timur. (Minggu, 1 Oktober 2023);
- Narasumber dalam Diskusi Publik, dengan Tema : "*Prabowo Mencari Cawapres"*, yang diselenggarakan oleh Relawan Yakin Indonesia Maju, di Upnormal Taman Puring, Jakarta. (Rabu, 4 Oktober 2023);
- Narasumber dalam Diskusi Publik, Papaparan Hasil Riset Persepsi Publik Calon Wakil Presiden, dengan Tema : "PELUANG YUSRIL IHZA MAHENDRA JADI CAWAPRES PRABOWO", yang diselenggarakan oleh GOGO BANGUN NEGERI (GBN), di Kopi Bangi, Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan. (Sabtu, 14 Oktober 2023);
- Narasumber dalam *LIVE* Diskusi *Tribunnews* dengan Tema: *"ANWAR USMAN Dipecat dari Ketua MK, Sidang Gugatan 141 Besok Gugurkan Gibran di Pilpres 2024?, yang disiarkan melalui TRIBUN-VIDEO.COM*, https://www.youtube.com/watch?v=zY1FeK1olyA (7 November 2023);
- Narasumber dalam *LIVE* Diskusi *IDN Times*dengan Tema : *"Nasib Gibran Pasca-Putusan MKMK".*

https://www.youtube.com/watch?v=bHn15ibqvQ8(7 November 2023);

- Narasumber dalam *LIVE* Diskusi *Kabar Petang* dengan Tema: *"Putusan MKMK "Amunisi" Hak Angket DPR, yang disiarkan melalui tvOne*, https://www.tvOnenews.com (https://www.youtube.com/watch?v=wky3LzDvMMY) (8 November 2023);
- Narasumber dalam *LIVE* Diskusi *Sindo Sore* dengan Tema: *"Paman Gibran Dicopot Dari Ketua MK", yang disiarkan melalui SINDONEWSTV*, https://www.youtube.com/watch?v=M4x9UNcZ044 , (8 November 2023);
- Narasumber dalam Seminar pada Rapat Kerja Nasional Ikatan Advokat Indonesia Tahun 2023 (RAKERNAS IKADIN 2023) dengan Tema : *"Melalui RAKERNAS IKADIN 2023, IKADIN Memperkokoh Kedudukan PERADI Sebagai Satu-satunya Organisasi Advokat"*, yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (DPP IKADIN), di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center, Jakarta Barat. (Jumat, 17 November 2023);
- Narasumber dalam Seminar pada Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PERADI 2023, dengan Tema: *"Mempertahankan Single Bar dan Independensi Advokat Sebagai Keharusan" (independency and single bar is a must)*, yang di selenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional PERADI, di Hotel ALILA Solo Jl. Slamet Riyadi No.562, Laweyan Kota Surakarta, Jawa Tengah 57144, (Kamis, 7 Desember 2023);
- Pembicara dalam Webinar Ildes, dengan tema : "*Upaya Delegitimasi Kemenangan Capres-Cawapres Pilpres 2024, - Fenomena Menang Satu Putaran, - Saling Tuding Pilpres Curang"*, yang diselenggarakan oleh Indonesia Law And Democracy Studies. (Selasa, 5 Desember 2023);
- Narasumber dalam LIVE Diskusi Kabar Petang dengan Tema: *"Debat Capres : Korupsi Marak & Hukum Loyo?"*, yang disiarkan melalui tvOne, https://www.youtube.com/watch?si=fWwY63nndNM8IgLO&v=cuU38n6qJvA&feature=youtu.be (Selasa, 12 Desember 2023);
- Pemateri pada Intermediate Training/Latihan Kader II, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Jakarta, dengan Tema : *"Reposisi gerakan HMI dalam mewujudkan indonesia emas"*, yang diselenggarakan oleh Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Jakarta Periode 2022-2023, (Minggu, 21 Januari 2024);
- Narasumber dalam LIVE Diskusi PILIHAN INDONESIA (CNN Indonesia) dengan Tema: *"Presiden Berpihak Langgar Hukum & Etika"*, yang disiarkan melalui CNN Indonesia, https://www.youtube.com/watch?v=xu_YHqv1UDk;
- Narasumber dalam LIVE Diskusi APA KABAR INDONESIA PAGI (tvOne) dengan Tema: *"Jokowi : Presiden dan Menteri Boleh Berpihak"*, yang disiarkan melalui tvOne, https://www.youtube.com/watch?v=mfqsQJHcPwY;
- Narasumber dalam LIVE Diskusi KOMPAS PETANG dengan Tema: *"Jokowi : Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres"*, yang disiarkan melalui KOMPASTV, https://www.youtube.com/watch?v=ejqMT4xaqMQ;
- Narasumber dalam LIVE Diskusi Indonesia Lawyers Club dengan Tema: *"Bolehkah Presiden Kampanye Untuk Putranya, Mahfud MD Ngasih Contoh"*, yang disiarkan melalui Canal Youtube ILC, https://www.youtube.com/watch?v=zJXHqgRcs2A;
- Narasumber dalam LIVE Diskusi SINDO SORE dengan Tema: "Indonesia Darurat Kenegarawanan", yang disiarkan melalui SINDONEWSTV, https://www.youtube.com/watch?v=FHFqQ5MxToM;

- Narasumber dalam LIVE Diskusi Primetime News Metrotv dengan Tema: *"KPU Disanksi Etik, Jalan Gibran Cacat Etik?"* yang disiarkan melalui METROTV, https://www.youtube.com/watch?v=TmAj7Vnp4IQ;
- Narasumber dalam LIVE Diskusi SINDO SORE dengan Tema: *"KPU Langgar Etik, Gibran Cawapres Ilegal"*, yang disiarkan melalui SINDONEWSTV, (Selasa, 6 Februari 2024) https://www.youtube.com/watch?v=HQ2HXK7v4bI;
- Narasumber dalam LIVE Diskusi SINDO SORE dengan Tema: *"Sarat Indikasi Pelanggaran, Rakyat Lawan Pemilu Curang"*, yang disiarkan melalui SINDONEWSTV, (Senin, 19 Februari 2024) https://www.youtube.com/watch?v=VYzEhma6Kn4;
- Narasumber dalam LIVE Diskusi Metrotv dengan Tema: *"Pemilu 2024 Beraroma Curang, Siapa Dalang ?* yang disiarkan melalui METROTV, https://www.youtube.com/watch?v=sZ1cBsmh-CM;
- Narasumber dalam Live Dialog Spesial Rakyat Bersuara dengan tema: Pemilu Curang, Hak Angket Bergulir. Ke Mana Ujungnya?, yang disiarkan melalui iNEWS TV https://www.youtube.com/watch?v=jyqMTRF9LBQ;
- Narasumber dalam LIVE Diskusi Primetime News Metrotv dengan Tema: *"Angket DPR Dekati Kenyataan, Siapa Deg-degan?* yang disiarkan melalui METROTV, https://www.youtube.com/watch?v=ZCe96fbOJmo;
- Narasumber dalam LIVE Diskusi SINDO SORE dengan Tema: *"Hak angket ungkap suara gelap"*, yang disiarkan melalui SINDONEWSTV, (Selasa, 27 Februari 2024). https://www.youtube.com/watch?v=6wNV5iqOL8Y;
- Narasumber dalam Live Kabar Petang TvOne dengan Tema: Empat Persen Dihapus, Partai Kecil Melaju Ke Senayan", yang disiarkan melalui TVONE, (Jumat, 1 Maret 2024). https://www.youtube.com/watch?v=J6A8FXRgow4;
- Narasumber dalam Live Beritasatu Sore dengan Tema: "MK Revisi Ambang Batas Parlemen 4 Persen", yang disiarkan melalui berita satu.com (BTV), (Sabtu, 2 Maret 2024). https://www.youtube.com/watch?v=JyMlLqBkizk;
- Narasumber dalam Live Diskusi PODCAST MERDEKA dengan Tema: "Hak Angket Pemilu Digulirkan, Menyasar Presiden Jokowi?", yang disiarkan melalui canal youtube MERDEKA.COM, https://www.youtube.com/watch?v=EqhoFWSMjdc;
- Narasumber dalam Live Diskusi Primetime News Metrotv dengan Tema: "Guru Besar Suarakan Pengadilan Rakyat", yang disiarkan melalui METROTV. (15 Maret 2024) https://www.youtube.com/watch?v=m_c8EGnrNZ8;
- Narasumber dalam Live Diskusi IDN TIMES GenZ Memilih dengan Tema: "Hak Angket Setengah Hati", yang disiarkan melalui IDN MEDIA. (15 Maret 2024) https://www.youtube.com/watch?v=STW7digSdBI;
- Narasumber dalam Live Diskusi KOMPAS PETANG dengan Tema: Hasil Pilpres, diterima Prabowo di Gugat Ganjar-Anies, yang disiarkan melalui KOMPASTV, (20 Maret 2024) https://www.youtube.com/watch?v=QNAfc17am7c;
- Narasumber dalam Live Diskusi DUA ARAH, dengan Tema: Perlukah Pemilu Ulang? yang disiarkan melalui KOMPASTV, (29 Maret 2024), https://www.youtube.com/watch?v=x-d5XhZzDzQ;

- Narasumber dalam iNews Live - DIALOG SPESIAL RAKYAT BERSUARA, dengan Tema: Menanti Gebrakan Sidang MK, yang disiarkan melalui Official iNews, (Selasa, 2 April 2024), https://www.youtube.com/watch?v=QJjGU-2q3uo dan Sindonews https://www.youtube.com/watch?v=RtK4-kFGJv4;
- Narasumber dalam Live Dialog CNN Indonesia Political Show, dengan Tema: Adu Saksi Menteri Jokowi di Mahkamah Konstitusi, yang disiarkan melalui CNN Indonesia, (4 April 2024), https://www.youtube.com/watch?v=WGHX09SIqVY;
- Narasumber dalam Live Dialog Selamat Pagi Indonesia, dengan Tema: Ramai-ramai Jadi Sahabat Pengadilan, yang disiarkan melalui Metrotv, (18 April 2024), https://www.youtube.com/watch?v=Lts5AEbyvCc;
- Narasumber dalam Live Dialog Musyawarah – Narasi/ MataNajwa, dengan Tema: Menuju Akhir Sengketa Pilpres, yang disiarkan melalui canal youtube Najwa Shihab, (19 April 2024), https://www.youtube.com/watch?v=hxX0IHoXkj0 ;
- Narasumber dalam Live Dialog DUA ARAH, dengan Tema: Amicus Curiae Megawati Demi Demokrasi atau Intervensi?, yang disiarkan melalui KOMPASTV, (19 April 2024), https://www.youtube.com/watch?v=en_tXU3eAsE.

NARASUMBER WEBINAR

- Pembicara Diskusi Online yang diselenggarakan oleh Badan Koordiansi Nasional Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum Mahasiswa Islam PB HMI dengan tema "RUU Omnibus Law (Cipta Kerja); Dampak Ekonomi Terhadap Msyarakat". (Via Zoom, 19 April 2020);
- Narasumber Ngaji Online yang dilaksanakan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah dengan tema "Republik Maluku Selatan (RMS) Bohol Polda Maluku di Musim Corona; Dimana Pertahanan Negara?". (Via Zoom, 26 April 2020);
- Pembicara Diskusi Online yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado dengan tema "Apakah Negara hadir Sebagai Negara di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia". (Via Zoom, 8 Mei 2020);
- Pembicara dalam Refleksi Keumatan dan Kebangsaan yang diselenggarakan atas kerja sama MUI Kota Ambon dan MUI Provinsi Maluku dengan tema "Menelaah RUU Haluan Ideologi Pancasila Dalam Perspektif Hukum dan Islam". (Via Zoom, 1 Juni 2020);
- Pemateri dalam Diskusi Online yang diselenggarakan oleh North Celebes Constitutional Law Society (NCCLS) dengan tema "Demokrasi dan Nomokrasi di Era New Normal". (Via Zoom, 14 Juni 2020);
- Pembicara dalam Diskusi Online yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dengan tema "RUU HIP Dalam Perpektif UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945".(Via Zoom, 17 Juni 2020);
- Pembicara Diskusi Online yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dengan tema "RUU Pemilu dan Presidential Threshold Dilihat dari Aspek Konstitusional". (Via Zoom, 29 Juni 2020);
- Pembicara Diskusi Online yang dilesenggarakan oleh Badan Koordiansi Nasional Lembaga Konsultasi dan

Bantuan Hukum Mahasiswa Islam PB HMI dengan tema "PERPU dan Dampak Penundaan Pilkada Ditengah Covid-19" . (Via Zoom, 30 Mei 2020);

- Pembicara dalam Webinar Pemikiran Islam yang diselenggarakan oleh Lingkar Dakwah Mahasiswa Islam (LIDMI) dengan tema "Islam dan Nasionalisme; Refleksi Sejarah dan Perjuangan yang Terlupakan Menuju Indonesia Beradab". (Via Zoom, 16 Agustus 2020);
- Pembicara dalam #GPPerMiTalk Law & Social yang diselenggarakan oleh Gerakan Pejuang Perempuan Milenial Kawan Komisi Yudisial Maluku dengan tema "RUU Omnibus Law Cipta Kerja; Peluang dan Tantangan Terhadap Ekonomi Indonesia". (Via Zoom, 25 September 2020);
- Narasumber dalam Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh Forum Indonesia Muda Cerdas (FIMC) Youth Voters Education Foarum Suara Anak Negeri untuk Indonesia dengan tema "Menjaga Prinsip Demokrasi untuk Mengawal Pilkada Serentak 2020 denganAman dan Damai". (Via Zoom, 13 Agustus 2020);
- Pembicara Diskusi Webinar yang diselenggarakan oleh Koalisi untuk Kesejahteraan TNI Polri dengan tema "Menimbang Tuntutan Kenaikan 50 Juta per Bulan Gaji TNI Polri", (Via Zoom, 27 Juli 2020);
- Pembicara dalam Webinar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Lingkar Dakwah Mahasiswa Islam (LIDMI) dengan tema "Dari CIPTAKER Ke UU ITE, Bagaimana Wajah Demokrasi saat ini?" (Via Zoom, 30 oktober 2020);
- Pembicara dalam Diskusi Online yang diselenggarakan oleh HMI Cabang Ambon dengan tema "Problem UU Cipta Kerja, Anarkisme Massa Aksi dan Brutalitas Aparat" (Via Zoom, 21 Oktober 2020;
- Pembicara Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat LIDMI dengan tema “Dari Anies Dipanggil Klarifikasi, Hingga TNI Turunkan Baliho, Bagaimana Neraca Berbangsa?”. (Via Zoom, 25 November 2020);
- Narasumber dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam dengan tema "Menyoal Kebocoran Pipa Gas PLTP Mandailing Natal., Apa Langkah Pemerintah?". (Via Zoom, 12 Februari 2021);
- Pembicara dalam Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat LIDMI dengan tema "Pro-Kontra SKB 3 Menteri, (Pakaian Seragam dan Atribut Peserta Didik) Perpektif Hukum, Agama, dan Pendidikan Nasional". (Via Zoom, 15 Februari 2021);
- Narasumber dalam Webinar Pekan Kajian Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Koordiansi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam PB HMI dengan tema "Apa yang terjadi dengan KPK yang baru?”. (Via Zoom, 25 Mei 2021);
- Narasumber dalam Webinar Hukum yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Magang/Kuliah Kerja Praktik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan tema "Peran Kampus Dalam Mendukung Fungsi Komisi Yudisial Demi Terwujudnya Peradilan Bersih”. (Via Zoom, Tanggal 10. Desember 2021).

PUBLIKASI ILMIAH

- Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen Undang-Undang Tahun 1945. “Skripsi”. F. Bachmid, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Tahun 2004;
- Pemberhentian (Impeachment) Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut

www.fahribachmid.com

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Tesis". F. Bachmid, Program Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Tahun 2009;

- The Rights of the Constitutional Court's Decision on the House of Representatives' Representatives about the President's Prospective and/or the President's Vice Representatives .. F Bachmid, S Sampara, LO Husen IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) 23 (10), 43-61, Dikutip Oleh 2, Tahun 20018;
- Hakikat Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara… F Bachmid Program Doktoral llmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Tahun 2019;
- Efektivitas Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara terhadap Narapidana Khusus Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon. N Umar, F Bachmid Sovereign: Jurnal llmiah Hukum 2 (2), 52-69, Dikutip Oleh 1, Tahun 2020;
- Optimalisasi Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Maluku. N Umar, F Bachmid Sovereign: Jurnal llmiah Hukum 2 (3), 1-14 Tahun 2020;
- Sistem Pembuktian Terbalik terhadap Delik Korupsi di Indonesia. M Hatta, YK Koni, F Bachmid, N Hipan, H Djanggih, CV. Sefa Bumi Persada Tahun 2020;
- Bachmid, F. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. SIGn Jurnal Hukum, Vol.2, (No.2),pp.87-103. https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83;
- Pri Pambudi Teguh, Fahri Bachmid, dan Ismail Rumadhan, The Supreme Court's Authority As An Implementer Of Independent Judicial Power In The Recruitment Of Judges, Vol 11, No 2 (2022).https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/653;
- Fahri Bachmid. The Supreme Court's Authority: Judicial Review Of Statutes And By-Laws Of Political Parties Against Laws ;
- Risang Aji Pradana, Sufirman Rahman & Fahri Bachmid, Urgensi Perubahan Jenis Pemidanaan Dalam Undang-Undang Narkotika Untuk Membuka Ruang Bagi Pemidanaan Yang Bermaslahat;
- Legal Standing of the Papua People's Assembly and Ratio Decidendi of the Constitutional Court: A Study of Court Decision. **Fahri Bachmid**, SIGn Jurnal Hukum, 3 (2), 187-200. https://doi.org/10.37276/sjh.v3i2.225;
- Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xx/2022 Terhadap Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat, **Fahri Bachmid,** Jurnal Hukum, Vol 5 No 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023), https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.398;
- Keabsahan Pengisian Penjabat Kepala Daerah Dari Tentara Nasional Indonesia, **Fahri Bachmid,** Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2023) ;
- Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024, Jurnal Hukum, Vol 7, No 1 (2024) : USM LAW REVIEW (ISSN 2621-4105), https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/7841;
- The Position of the Letter from the Chief of the Supreme Court and the Decision of the Constitutional Court in the Polemic on the Advocate's Oath, VOL. 4 NO. 2 (2024) : (JLPH) JOURNAL OF LAW, POLITIC AND HUMANITIES (JANUARY - FEBRUARY 2024), https://dinastires.org/JLPH/article/view/319 .

PUBLIKASI MEDIA

- 30 November 2019, Putusan MK Soal Peradi Organisasi Advokat Tunggal Dinilai Tepat, dari laman: https://www.vivanews.com/berita/nasional/21925-putusan-mk-soal-peradi-organisasi-advokat-tunggal-dinilai-tepat ;
- 25 November 2019, Polernik Masa Jabatan Presiden Dinilai Harns Disertai Kajian Akadernik, dari laman:https://www.inews.id/news/nasional/polemik-masa-jabatan-presiden-dinilai-harus-disertaikajian-akademik ;
- 26 Oktober 2019, Bereskan Masalah Hukum, Jokowi Dinilai Perlu Bentuk Lembaga Legislasi Nasional, dari laman: https://www.liputan6.com/news/read/4096093/bereskan-masalah-hukum-jokowi-dinilai-perlu-bentuklembaga-legislasi-nasional;
- 25 Oktober 2019, Konsep Omnibus Law Butuh Pusat Legislasi Nasional, dari laman: https://www.beritasatu.com/nasional/581790/konsep-omnibus-law-butuh-pusat-legislasinasional;
- 21 Oktober 2019, DPR Didorong Revisi UU MD3 soal Nomenklatur Pelantikan Presiden, dari laman: https://www.senayanpost.com/dpr-didorong-revisi-uu-md3-soal-nomenklatur-pelantikan-presiden/ ;
- 29 Oktober 2019, Pakar HIN Fahri Bachmid Tegaskan Pengangkatan Wamen Legal-Konstitusional, dari laman: https://jabar.sindonews.com/read/11672/1/pakar-htn-fahri-bachrnid-tegaskan-pengangkatan-wamen-legalkonstitusional-1572336611;
- 17 Juli 2019, Hak Angket DPRD Sulsel Dinilai Sumir Dan Tak Miliki Derajat Konstitusional, dari laman: https://makassar.sindonews.com/read/28643/1/hak-angket-dprd-sulsel-dinilai-sumir-dan-tak-miliki-derajat-konstitusional-1563365239;
- 4 Juli 2019, Memaharni Konsep Judicial Activism di Mahkamah Konstitusi, dari laman: https://www.inews.id/news/nasional/memahami-konsep-judicial-activism-di-mahkamah-konstitusi/585057;
- 3 Juli 2019, Poin-poin Penting Pascaputusan MK dalarn Sengketa Pemilu 2019, dari laman: https://nasional.sindonews.com/read/1417140/12/poin-poin-penting-pascaputusan-mk-dalam-sengketa-pemilu-2019-1562161981;
- 30 Juni 2019, Beban Pembuktian di MK Berada Pada Pihak Berperkara Bukan Hakim Konstitusi, dari laman: https://www.tribunnews.com/nasional/2019/06/30/beban-pembuktian-di-mk-berada-pada-pihak-berperkara-bukan-hakim-konstitusi;
- 30 Juni 2019, Putusan MK Dinilai Mengikat, Tak Ada Alasan untuk Tidak Menerima, dari laman: https://nasional.sindonews.com/read/l416051/12/putusan-mk-dinilai-mengikat-alasan-alasan-untuk-tidak-menerima-l561854807;
- 7 Oktober 2019, Polernik Perppu KPK, Ini Penjelasan Soal Negara dalam Keadaan Darurat, dari laman: https://www.vivanews.com/berita/nasional/ll792-polemik-perppu-kpk-ini-penjelasan-soal-negara-dalarn-keadaan-darurat;
- 15 Juni 2019, Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Raih Wisudawan Terbaik Program Doktor UMI, dari laman: https://makassar.tribunnews.com/2019/06/15/kuasa-hukum-jokowi-maruf-raih-wisudawan-terbaik-program-doktor-umi;
- 16 Mei 2019, Tim Asistensi Bentukan Menkopolhukam Dinilai Inkonstitusional, dari laman: https://fajar.co.id/2019/05/16/tim-asistensi-bentukan-menkopolhukam-dinilai-inkonstitusional/;

- 11 Maret 2019, Kajian Doktor UMI Makassar Soal Pemakzulan Presiden, dari laman: https://www.liputan6.com/regional/read/3913848/kajian-doktor-urni-makassar-soal-pemakzulan-presiden;
- 5 November 2020, UU Cipta Kerja Salah Ketik, Pakar HTN Fahri Bachmid Tawarkan Tiga Opsi https://beritanasional.id/uu-cipta-kerja-salah-ketik-pakar-htn-fahri-bachmid-tawarkan-tiga-opsi/;
- 5 November 2020, Pakar Hukum UMI Makassar Tawarkan Tiga Opsi Perbaikan UU Cipta Kerja https://indonesiainside.id/headline/2020/11/05/pakar-hukum-umi-makassar-tawarkan-tiga-opsi-perbaikan-uu-cipta-kerja;
- 5 Nnovember 2020, Pakar Hukum UMI Makassar Tawarkan Tiga Opsi Perbaikan UU Cipta Kerja https://indonesiainside.id/headline/2020/11/05/pakar-hukum-umi-makassar-tawarkan-tiga-opsi-perbaikan-uu-cipta-kerja ;
- 11 November 2020 UU Cipta Kerja Salah Ketik, Pakar HTN Fahri Bachmid Tawarkan Tiga Opsi https://www.faktanews.id/2020/11/uu-cipta-kerja-salah-ketik-pakar-htn.html;
- 05 November 2020, UU Cipta Kerja Salah Ketik, Pakar HTN Fahri Bachmid Tawarkan Tiga Opsi https://tilik.id/2020/11/05/uu-cipta-kerja-salah-ketik-pakar-htn-fahri-bachmid-tawarkan-tiga-opsi/ ;
- 06 November 2020, Salah Ketik di UU Cipta Kerja Menandakan Prinsip Zero Mistake Belum Diterapkan https://m.liputan6.com/news/read/4401533/salah-ketik-di-uu-cipta-kerja-menandakan-prinsip-zero-mistake-belum-diterapkan;
- 23 November 2020, Pakar Hukum: Tugas TNI Jaga Pertahanan Negara, Turunkan Baliho Salahi Prosedur. https://m.liputan6.com/news/read/4415913/pakar-hukum-tugas-tni-jaga-pertahanan-negara-turunkan-baliho-salahi-prosedur;
- 08 Desember 2020, Pakar Hukum Tata Negara: Penembakan Laskar FPI Bisa Tergolong Extra Judicial Killing Jika... https://hukum.rmol.id/read/2020/12/08/464881/Pakar-Hukum-Tata-Negara:-Penembakan-Laskar-FPI-Bisa-Tergolong-Extra-Judicial-Killing-Jika...-
- 11 November 2020, UU Cipta Kerja salah ketik, Fahri Bachmid tawarkan tigaopsi, https://www.antaranews.com/berita/1822724/uu-cipta-kerja-salah-ketik-fahri-bachmid-tawarkan-tiga-opsi;
- 08 Des 2020, 6 Anggota FPI Ditembak Polisi, Pemerintah Diminta Bentuk Tim Pencari Fakta, https://www.liputan6.com/news/read/4428691/6-anggota-fpi-ditembak-polisi-pemerintah-diminta-bentuk-tim-pencari-fakta;
- 09 Desember 2020, Pengamat: Tindakan Polisi Berpotensi Jadi Unlawful Killing https://huku.rmol.id/read/2020/12/08/464881/Pakar-Hukum-Tata-Negara:-Penembakan-Laskar-FPI-Bisa-Tergolong-Extra-Judicial-Killing-Jika;
- 09 Desember 2020, Penembakan 6 Pengikut FPI Dinilai Berpotensi Extra Judicial Killing https://www.jawapos.com/nasional/09/12/2020/penembakan-6-pengikut-fpi-dinilai-berpotensi-extra-judicial-killing/;
- 11 Mei 2021, Fahri Bachmid: Secara Konstitusional, Proses Alih Status Tidak Boleh Merugikan Pegawai KPK, https://suaramerdekajkt.com/2021/05/11/fahri-bachmid-secara-konstitusional-proses-alih-status-tidak-boleh-merugikan-pegawai-kpk/;
- 11 Mei 2021, Secara Konstitusional, Alih Status Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK, https://akuratnews.com/secara-konstitusional-alih-status-tak-boleh-rugikan-pegawai-kpk/;

- 11 Mei 2021, Pakar Hukum Tata Negara: Alih Status Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK, https://nasional.sindonews.com/read/425030/13/pakar-hukum-tata-negara-alih-status-tak-boleh-rugikan-pegawai-kpk-1620723955;
- 27 Juli 2021, Sekda Maluku Diganti, Fahri Bachmid; Dalam Keadaan Tertentu Gubernur Dapat Usulkan Ganti Sekda, https://ambon.tribunnews.com/2021/07/27/sekda-maluku-diganti-fahri-bachmid-dalam-keadaan-tertentu-gubernur-dapat-usulkan-ganti-sekda;
- 29 Juli 2021, Opini - Polemik penggantian Sekda Maluku dari tinjauan Hukum Tata Negara, https://ambon.antaranews.com/berita/103394/opini-polemik-penggantian-sekda-maluku-dari-tinjauan-hukum-tata-negara;
- 5 Agustus 2021, Masa Jabatan Sadli Le Jadi Polemik, Berikut Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid, https://ambon.tribunnews.com/2021/08/05/masa-jabatan-sadli-le-jadi-polemik-berikut-penjelasan-pakar-hukum-tata-negara-fahri-bachmid;
- 5 Agustus 2021, Fahri Bachmid : Secara Yuridis Masa Jabatan PLH Sekda sampai dengan Diaktifkan kembali Sekda Definitif atau dilantiknya Penjabat Sekda, http://rakyatmaluku.com/fahri-bachmid-secara-yuridis-masa-jabatan-plh-sekda-sampai-dengan-diaktifkan-kembali-sekda-definitif-atau-dilantiknya-penjabat-sekda/;
- 4 September 2021, Fahri Bachmid: Rencana Amendemen UUD 1945 Cacat Konsep dan Paradigma, https://www.beritasatu.com/politik/823151/fahri-bachmid-rencana-amendemen-uud-1945-cacat-konsep-dan-paradigma;
- 4 September 2021, Fahri Bachmid: Rencana Amendemen UUD 1945 oleh MPR Cacat Konsep dan Paradigma, https://nasional.sindonews.com/read/531598/12/fahri-bachmid-rencana-amendemen-uud-1945-oleh-mpr-cacat-konsep-dan-paradigma-1630742997;
- 5 September 2021, Pakar Hukum Tata Negara: Rencana Amendemen Konstitusi oleh MPR Cacat Konsep dan Paradigma. https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/05/pakar-hukum-tata-negara-rencana-amendemen-konstitusi-oleh-mpr-cacat-konsep-dan-paradigma;
- 5 September 2021, Pakar nilai rencana amendemen UUD 1945 tidak bisa terburu-buru, https://www.antaranews.com/berita/2372754/pakar-nilai-rencana-amendemen-uud-1945-tidak-bisa-terburu-buru?utm_medium=mobile;
- 28/09/2021 Fahri Bachmid Benarkan Diminta Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm SCBD-Bali Office menjadi Ahli Dalam Pengajuan JR AD/ART Partai Demokrat ke MA RI https://rakyat.news/read/2021/09/28/8591/fahri-bachmid-benarkan-diminta-kantor-hukum-ihza-ihza-law-firm-scbd-bali-office-menjadi-ahli-dalam-pengajuan-jr-ad-art-partai-demokrat-ke-ma-ri/;
- 28 September 2021, Pakar Hukum UMI Jadi Saksi Ahli Pengajuan Judicial Review AD/ART Partai Demokrat, https://fajar.co.id/2021/09/28/pakar-hukum-umi-jadi-saksi-ahli-pengajuan-judicial-review-ad-art-partai-demokrat/;
- 28 September 2021 Fahri Bachmid Diminta Yusril Sebagai Ahli Dalam Gugatan AD/ART Demokrat, https://www.merdeka.com/politik/fahri-bachmid-diminta-yusril-sebagai-ahli-dalam-gugatan-adart-demokrat.html;
- 28 September 2021 , Gugat Demokrat, Yusril Akan Hadirkan Pakar Hukum Fahri Bachmid, https://www.viva.co.id/berita/nasional/1409050-gugat-demokrat-yusril-

akan-hadirkan-pakar-hukum-fahri-bachmid;

- 29 September 2021, Gugat AD/ART Demokrat, Yusril Gandeng Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid https://www.liputan6.com/news/read/4670689/gugat-adart-demokrat-yusril-gandeng-pakar-hukum-tata-negara-fahri-bachmid;
- 29 September 2021, Ini Sosok Pakar Hukum Tata Negara yang Ditunjuk Yusril Jadi Ahli untuk Gugat AD/ART Demokrat ke MA, https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2021/09/29/ini-sosok-pakar-hukum-tata-negara-yang-ditunjuk-yusril-jadi-rencana-amendemen-konstitusi-oleh-mpr-cacat-konsep-dan-paradigma;
- 5 September 2021, Pakar nilai rencana amendemen UUD 1945 tidak bisa terburu-buru, https://www.antaranews.com/berita/2372754/pakar-nilai-rencana-amendemen-uud-1945-tidak-bisa-terburu-buru?utm_medium=mobile;
- 28/09/2021 Fahri Bachmid Benarkan Diminta Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm SCBD-Bali Office menjadi Ahli Dalam Pengajuan JR AD/ART Partai Demokrat ke MA RI https://rakyat.news/read/2021/09/28/8591/fahri-bachmid-benarkan-diminta-kantor-hukum-ihza-ihza-law-firm-scbd-bali-office-menjadi-ahli-dalam-pengajuan-jr-ad-art-partai-demokrat-ke-ma-ri/;
- 28 September 2021, Pakar Hukum UMI Jadi Saksi Ahli Pengajuan Judicial Review AD/ART Partai Demokrat, https://fajar.co.id/2021/09/28/pakar-hukum-umi-jadi-saksi-ahli-pengajuan-judicial-review-ad-art-partai-demokrat/;
- 28 September 2021 Fahri Bachmid Diminta Yusril Sebagai Ahli Dalam Gugatan AD/ART Demokrat, https://www.merdeka.com/politik/fahri-bachmid-diminta-yusril-sebagai-ahli-dalam-gugatan-adart-demokrat.html;
- 28 September 2021 , Gugat Demokrat, Yusril Akan Hadirkan Pakar Hukum Fahri Bachmid, https://www.viva.co.id/berita/nasional/1409050-gugat-demokrat-yusril-akan-hadirkan-pakar-hukum-fahri-bachmid;
- 29 September 2021, Gugat AD/ART Demokrat, Yusril Gandeng Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid https://www.liputan6.com/news/read/4670689/gugat-adart-demokrat-yusril-gandeng-pakar-hukum-tata-negara-fahri-bachmid;
- 29 September 2021, Ini Sosok Pakar Hukum Tata Negara yang Ditunjuk Yusril Jadi Ahli untuk Gugat AD/ART Demokrat ke MA, https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2021/09/29/ini-sosok-pakar-hukum-tata-negara-yang-ditunjuk-yusril-jadi-ahli-untuk-gugat-adart-demokrat-ke-ma;
- 29 September 2021, Dosen UMI Dr Fahri Bachmid Jadi Ahli Judicial Review AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung RI, https://makassar.tribunnews.com/2021/09/29/dosen-umi-dr-fahri-bachmid-jadi-ahli-judicial-review-adart-partai-demokrat-ke-mahkamah-agung-ri;
- 03 Oktober 2021, Bela Yusril, Fahri Bachmid Sindir Pernyataan M Rizal Fadillah https://fajar.co.id/2021/10/03/bela-yusril-fahri-bachmid-sindir-pernyataan-m-rizal-fadillah/;
- 03 Oktober 2021, Fahri Bachmid : Partai Politik adalah Properti Nasional, Perbaikan adalah Keniscayaan, https://rakyat.news/read/2021/10/03/9440/fahri-bachmid-partai-politik-adalah-properti-nasional-perbaikan-adalah-keniscayaan/;
- Minggu, 05 Desember 2021, Pakar Hukum: DPR dan Pemerintah Bakal Kesulitan Rampungkan UU Cipta Kerja dalam 2 Tahun. https://wartaekonomi.co.id/read378628/pakar-hukum-dpr-dan-pemerintah-

bakal-kesulitan-rampungkan-uu-cipta-kerja-dalam-2-tahun;

- Senin, 06 Desember 2021, Problematik pemerintah dan DPR selesaikan perbaikan UU Cipta Kerja https://www.antaranews.com/berita/2567293/problematik-pemerintah-dan-dpr-selesaikan-perbaikan-uu-cipta-kerja;
- 06 Desember 2021, Perbaikan UU Ciptaker akan Tuai Masalah jika Tak Positifkan Metode Omnibus Law. https://www.gatra.com/news-530406-nasional-perbaikan-uu-ciptaker-akan-tuai-masalah-jika-tak-positifkan-metode-omnibus-law.html;
- Selasa 14 Desember 2021, Pakar: Sulsel Harus Dipimpin Gubernur Definitif. https://www.republika.co.id/berita/r42v9f396/pakar-sulsel-harus-dipimpin-gubernur-definitif;
- 14 Desember 2021, Fahri: Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Potensial Menjadi Penjabat. https://www.jawapos.com/nasional/politik/14/12/2021/fahri-plt-gubernur-sulsel-andi-sudirman-potensial-menjadi-penjabat-%ef%bb%bf/;
- 14 Desember 2021, Fahri Bachmid: Andi Sudirman Sulaiman Potensial Jadi Penjabat atau Gubernur Sulsel, https://www.liputan6.com/news/read/4752312/fahri-bachmid-andi-sudirman-sulaiman-potensial-jadi-penjabat-atau-gubernur-sulsel;
- 07 Januari 2022, Jadi Saksi Ahli, Fahri Bachmid Sebut BPN Depok Langgar UU Terkait Penerbitan SHGB PT Pakuan, https://hukum.rmol.id/read/2022/01/07/518381/jadi-saksi-ahli-fahri-bachmid-sebut-bpn-depok-langgar-uu-terkait-penerbitan-shgb-pt-pakuan;
- 07 Januari 2022, Saksi Ahli, Fahri Bachmid Sebut BPN Depok Langgar UU Terkait Penerbitan SHGB PT. Pakuan, https://m.merdekanews.co/read/14699/Saksi-Ahli-Fahri-Bachmid-Sebut-BPN-Depok-Langgar-UU-Terkait-Penerbitan-SHGB-PT-Pakuan;
- 07 Januari 2022, Jadi Ahli, Fahri Bachmid Sebut BPN Depok Langgar UU, https://www.beritasatu.com/nasional/876105/jadi-ahli-fahri-bachmid-sebut-bpn-depok-langgar-uu;
- 08 Januari 2022, Jadi Saksi Ahli, Pakar Hukum Nilai BPN Depok Langgar UU, https://republika.co.id/amp/r5cp2e354;
- 09 Januari 2022, Saksi Ahli: SK Kinag Produk Hukum Kepemilikan Tanah, https://www.gatra.com/news-533148-Hukum-saksi-ahli-sk-kinag-produk-hukum-kepemilikan-tanah.html;
- 22Januari 2022, Pakar Hukum Beberkan Alasan UU IKN Rentan Digugat ke MK https://www.merdeka.com/peristiwa/pakar-hukum-beberkan-alasan-uu-ikn-rentan-digugat-kemkhtml;
- 22Januari 2022, Pakar HTN Uraikan Potensi Masalah UU IKN Baru yang Bisa Dibatalkan MK https://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/22/pakar-htn-uraikan-potensi-masalah-uu-ikn-baru-yang-bisa-dibatalkan-mk;
- 23Januari 2022, Ahli Hukum: UU IKN Rawan Digugat ke MK jika Ada Masyarakat yang Rugi https://www.jawapos.com/nasional/23/01/2022/ahli-hukum-uu-ikn-rawan-digugat-ke-mk-jika-adamasyarakat-yang-rugi/;
- 23Januari 2022, Pakar Hukum: MK Bisa Batalkan UU Ibu Kota Negara https://www.viva.co.id/berita/nasional/1443066-pakar-hukum-mk-bisa-batalkan-uu-ibu-kota-negara;
- 24Januari 2022, Pakar Hukum Uraikan Potensi Masalah UU IKN Baru yang Bisa Dibatalkan MK https://www.liputan6.com/news/read/4868011/pakar-hukum-uraikan-potensi-masalah-uu-ikn-baru-yang-bisa-dibatalkan-mk;

- 25Januari 2022, UU IKN Baru Bisa Dibatalkan MK, Begini Penjelasan Pakar https://politik.rmol.id/read/2022/01/25/520795/uu-ikn-baru-bisa-dibatalkan-mk-begini-penjelasan-pakar;
- 20 Februari 2022, DPD JR Presidential Threshold, Pakar: Ciptakan Perdebatan Konstitusional. https://www.beritasatu.com/politik/893033/dpd-jr-presidential-threshold-pakar-ciptakan-perdebatan-konstitusional;
- 27 Februari 2022, Pakar: Penundaan pemilu merupakan pembangkangan konstitusi. https://www.antaranews.com/berita/2730257/pakar-penundaan-pemilu-merupakan-pembangkangan-konstitusi;
- 28 Februari 2022, Pakar Hukum Tata Negara: Usulan Penundaan Pemilu Pembangkangan Terhadap Konstitusi. https://www.liputan6.com/news/read/4899260/pakar-hukum-tata-negara-usulan-penundaan-pemilu-pembangkangan-terhadap-konstitusi;
- 28 Februari 2022, Pakar Hukum Tata Negara: Penundaan Pemilu 2024 Pembangkangan Konstitusi. https://www.kompas.tv/article/265639/pakar-hukum-tata-negara-penundaan-pemilu-2024-pembangkangan-konstitusi;
- 28 Februari 2022, Usulan Penundaan Pemilu Dinilai Pembangkangan Konstitusi. https://www.jawapos.com/nasional/28/02/2022/usulan-penundaan-pemilu-dinilai-pembangkangan-konstitusi;
- 28 Februari 2022, Pakar Hukum: Usulan Penundaan Pemilu merupakan Pembangkangan Konstitusi. https://politik.rmol.id/read/2022/02/28/525024/pakar-hukum-usulan-penundaan-pemilu-merupakan-pembangkangan-konstitusi;
- 2 Maret 2022, Kuliah Umum FH UMI Bahas Implementasi Teknologi Peradilan Modern. https://sulsel.fajar.co.id/2022/03/02/kuliah-umum-fh-umi-bahas-implementasi-teknologi-peradilan-modern/;
- 1 Maret 2022, Fahri Bachmid dan Sekjen MK RI Bahas Implementasi Teknologi Peradilan Modern di UMI. https://rakyat.news/read/34982/fahri-bachmid-dan-sekjen-mk-ri-bahas-implementasi-teknologi-peradilan-modern-di-umi/;
- 23 April 2022, Pakar: Kemandirian dan kebebasan Peradi dijamin UU Advokat, https://www.antaranews.com/berita/2839869/pakar-kemandirian-dan-kebebasan-peradi-dijamin-uu-advokat;
- 24 April 2022, Fahri Bachmid: Sebagai Organ Negara, Idealnya Peradi Tidak Memerlukan Pengesahan Menkumham, https://www.hukumonline.com/berita/a/fahri-bachmid--sebagai-organ-negara--idealnya-peradi-tidak-memerlukan-pengesahan-menkumham-lt6264d10d63f86/;
- 24 April 2022, Pakar Hukum Tata Negara: Kemandirian dan Kebebasan Peradi Dijamin UU Advokat, https://www.liputan6.com/news/read/4946982/pakar-hukum-tata-negara-kemandirian-dan-kebebasan-peradi-dijamin-uu-advokat;
- 24 April 2022, Peradi adalah Organ Negara, Tak Perlu Pengesahan Menteri, https://www.kompas.id/baca/hukum/2022/04/24/peradi-adalah-organ-negara-tak-perlu-pengesahan-menteri;
- 27 April 2022, Pemekaran DOB di Papua-Papua Barat, Fahri Bachmid: Realistis dan Solutif, https://www.liputan6.com/regional/read/4950607/pemekaran-dob-di-papua-papua-barat-fahri-bachmid-realistis-dan-solutif;
- 28 April 2022, Pembentukan DOB Papua Dinilai Konstitusional dan Solutif, https://www.beritasatu.com/news/921

569/pembentukan-dob-papua-dinilai-konstitusional-dan-solutif;

- 17 Mei 2022, Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua, https://nasional.kompas.com/read/2022/05/17/14322811/uji-materiil-uu-otsus-ahli-presiden-pertanyakan-kedudukan-hukum-majelis;
- 17 Mei 2022, Uji Materi UU Otsus Papua, Pemerintah Hadirkan Fahri Bachmid, https://www.viva.co.id/berita/nasional/1475910-uji-materi-uu-otsus-papua-pemerintah-hadirkan-fahribachmid?utm_source=viva_android_app&utm_medium=share_button&utm_campaign=share_content;
- 18 Mei 2022, Fahri Bachmid Hadir sebagai Ahli Presiden dalam Sidang Uji Materiil UU No.2/2021, https://www.hukumonline.com/berita/a/fahri-bachmid-hadir-sebagai-ahli-presiden-dalam-sidang-uji-materiil-uu-no2-2021-lt628461619081a/;
- 26 Mei 2022, Bantah Mahfud, Pakar Hukum Sebut Prajurit TNI Aktif Jadi Pj Kepala Daerah Tidak Konstitusional, https://www.kompas.tv/article/292922/bantah-mahfud-pakar-hukum-sebut-prajurit-tni-aktif-jadi-pj-kepala-daerah-tidak-konstitusional;
- 27 Mei 2022, Penunjukan Pj Unsur TNI Aktif Tidak Punya Pijakan Konstitusional, https://politik.rmol.id/read/2022/05/27/535011/Fahri-Bachmid:-Penunjukan-Pj-Unsur-TNI-Aktif-Tidak-Punya-Pijakan-Konstitusional- ;
- 27 Mei 2022, Pakar Hukum: Penunjukkan TNI Aktif Sebagai Penjabat Tak Konstitusional, https://www.viva.co.id/berita/nasional/1478973-pakar-hukum-penunjukkan-tni-aktif-sebagai-penjabat-tak;
- 27 Mei 2022, Analisis Pakar: TNI Aktif Jadi Pj Kepala Daerah Tak Punya Dasar Hukum, https://www.merdeka.com/peristiwa/analisis-pakar-tni-aktif-jadi-pj-kepala-daerah-tak-punya-dasar-hukum.html;
- 14 Juni 2022, Pengujian UU Hak Cipta di MK, Otto Hasibuan Hadirkan Pakar HTN Fahri Bachmid sebagai Ahli. https://nasional.rakyat.news/read/53301/pengujian-uu-hak-cipta-di-mk-otto-hasibuan-hadirkan-pakar-htn-fahri-bachmid-sebagai-ahli;
- 14 Juni 2022, Perjanjian Jual Beli Putus dalam Pandangan Ahli Hukum dan Pelaku Industri Musik. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18282&menu=2;
- 15 Juni 2022, Uji Materi UU Hak Cipta di MK, Saksi Ahli Sebut Negara harus Jadi Protector. https://www.merdeka.com/peristiwa/uji-materi-uu-hak-cipta-di-mk-saksi-ahli-sebut-negara-harus-jadi-protector.html;
- 15 Juni 2022, Pakar Hukum Sebut Negara Wajib Lindungi Hak Milik Warga. https://www.viva.co.id/berita/nasional/1485409-pakar-hukum-sebut-negara-wajib-lindungi-hak-milik-warga;
- 14 Juli 2022, Forum Eksaminasi Putusan MK di DPD RI: Kualitas Analisis MK Semakin Berkurang, https://harian.fajar.co.id/2022/07/14/forum-eksaminasi-putusan-mk-di-dpd-ri-kualitas-analisis-mk-semakin-berkurang/;
- 14 Juli 2022, Forum Eksaminasi Putusan MK di DPD RI: Kualitas Analisis MK Semakin Berkurang, https://nasional.rakyat.news/read/60054/forum-eksaminasi-putusan-mk-di-dpd-ri-kualitas-analisis-mk-semakin-berkurang;
- 16 Juli 2022, Dosen UMI Sekaligus Saksi Ahli Fahri Bachmid Soroti Keputusan Kementerian ESDM RI, https://makassar.tribunnews.com/2022/07/16/dosen-umi-sekaligus-saksi-ahli-fahri-bachmid-soroti-keputusan-kementerian-esdm-ri;
- 18 Juli 2022, Keputusan Kementerian ESDM Jadi Sorotan Pakar Hukum Tata

Negara dan Administrasi di PTUN Jakarta, https://wartakota.tribunnews.com/2022/07/18/keputusan-kementerian-esdm-jadi-sorotan-pakar-hukum-tata-negara-dan-administrasi-di-ptun-jakarta;

- 30 Juli 2022, Fahri Bachmid Ditetapkan Jadi Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Pemerintahan UMI, https://www.liputan6.com/news/read/5028101/fahri-bachmid-ditetapkan-jadi-direktur-eksekutif-pusat-studi-konstitusi-dan-pemerintahan-umi ;
- 10 Oktober 2022, Pakar Hukum Fahri Bachmid Menilai Saksi dan Terperiksa Wajib Didampingi Advokat, https://akurat.co/pakar-hukum-fahri-bachmid-menilai-saksi-dan-terperiksa-wajib-didampingi-advokat;
- 10 Oktober 2022, Pakar Hukum Menilai Saksi dan Terperiksa Wajib Didampingi Advokat, https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/10/2022/pakar-hukum-menilai-saksi-dan-terperiksa-wajib-didamping-advokat/;
- 28 November 2022, Aturan Hukum dan Etika Presiden Endorse Capres Jelang Pemilu, https://m.merdeka.com/amp/politik/aturan-hukum-dan-etika-presiden-endorse-capres-jelang-pemilu-hot-issue.html;
- 13 Desember 2022, Rakernas Peradi Tahun 2022 Soroti Intervensi terhadap Independensi Advokat. MK mengesampingkan fakta yuridis dan faktual sebuah organisasi mandiri milik para anggota yang berdaulat, https://www.hukumonline.com/berita/a/rakernas-peradi-tahun-2022-soroti-intervensi-terhadap-independensi-advokat-lt639828f16dca6/;
- 14 Desember 2022, Sikapi Putusan MK, Peradi Hadirkan Gayus Lumbuun dan Fahri Bachmid, https://www.gatra.com/news-560543-hukum-sikapi-putusan-mk-peradi-hadirkan-gayus-lumbuun-dan-fahri-bachmid.html;
- 14 Desember 2022, Gelar Rakernas, Peradi Bahas Persoalan Advokat hingga Perjuangan 'Single Bar' https://m.tribunnews.com/nasional/2022/12/14/gelar-rakernas-peradi-bahas-persoalan-advokat-hingga-perjuangan-single-bar;
- 14 Desember 2022, Diskusi Rakernas Peradi : bedah Putusan MK, https://nusantaratv.com/berita/diskusi-rakernas-peradi-bedah-putusan-mk;
- 03 Jamuari 2023, Fahri Bachmid: Perppu Cipta Kerja Kebijakan yang Destruktif Atas Supremasi Konstitusi, https://www.liputan6.com/news/read/5170901/fahri-bachmid-perppu-cipta-kerja-kebijakan-yang-destruktif-atas-supremasi-konstitusi;
- 03 Jamuari 2023, Fahri Bachmid: Perpu Cipta Kerja Kebijakan Destruktif Atas Supremasi Konstitusi, https://www.harianterbit.com/nasional/pr-2746411521/fahri-bachmid-perpu-cipta-kerja-kebijakan-destruktif-atas-supremasi-konstitusi;
- 03 Jamuari 2023, Fahri Bachmid: Perpu Cipta Kerja Kebijakan Yang Destruktif Atas Supremasi Konstitusi, https://www.abadikini.com/2023/01/03/fahri-bachmid-perpu-cipta-kerja-kebijakan-yang-destruktif-atas-supremasi-konstitusi/ ;
- 04 Jamuari 2023, Pakar Hukum: Perppu Cipta Kerja Kebijakan Destruktif atas Konstitusi, https://tilik.id/2023/01/04/pakar-hukum-perppu-cipta-kerja-kebijakan-destruktif-atas-konstitusi/;
- 10 Januari 2023, Fahri Bachmid Dihadirkan Oleh Penggugat Sebagai Ahli Di PTUN Jakarta, Lawan Kemenhub, https://www.abadikini.com/2023/01/10/fahri-bachmid-dihadirkan-oleh-penggugat-sebagai-ahli-di-ptun-jakarta-lawan-kemenhub/;
- 12 Januari 2023, Pakar sebut sistem pemilu proporsional tertutup tetap

konstitusional, https://www.antaranews.com/berita/3346380/pakar-sebut-sistem-pemilu-proporsional-tertutup-tetap-konstitusional;

- 12 Januari 2023 , , Pakar: Sistem Proporsional Tertutup Tetap Konstitusional dan Terjamin Derajat Demokratis, https://www.liputan6.com/news/read/5178409/pakar-sistem-proporsional-tertutup-tetap-konstitusional-dan-terjamin-derajat-demokratis;
- 12 Januari 2023 , Fahri: Jika Sistem Pemilu Tertutup, Rakyat Hanya Memilih Logo Parpol, https://www.jawapos.com/nasional/12/01/2023/fahri-jika-sistem-pemilu-tertutup-rakyat-hanya-memilih-logo-parpol/;
- 12 Januari 2023, Pakar Soal Sistem Coblos Partai: Minimalisir Politik Uang karena Biaya Pemilu Murah, https://www.merdeka.com/peristiwa/pakar-soal-sistem-coblos-partai-minimalisir-politik-uang-karena-biaya-pemilu-murah.html;
- 13 Januari 2023, Soal Pemilu Sistem Proporsional Tertutup, Ini Pendapat Pakar, https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1017455/soal-pemilu-sistem-proporsional-tertutup-ini-pendapat-pakar;
- 05 Februari 2023, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Diharapkan Berintegritas Tinggi, https://www.jawapos.com/nasional/05/02/2023/wakil-ketua-ma-bidang-yudisial-diharapkan-berintegritas-tinggi/;
- 05 Februari 2023, Pakar Hukum: Jaga Marwah, Pimpinan MA Harus Kuat dan Berintegritas, https://daerah.sindonews.com/read/1015163/604/pakar-hukum-jaga-marwah-pimpinan-ma-harus-kuat-dan-berintegritas-1675634570;
- 06 Februari 2023, Bursa Wakil Ketua MA, Ahli Hukum Minta Hakim Agung Pilih Calon yang Tegas, https://news.detik.com/berita/d-6554394/bursa-wakil-ketua-ma-ahli-hukum-minta-hakim-agung-pilih-calon-yang-tegas;
- 06 Februari 2023, Wakil Ketua MA yang Baru Diharapkan Tegas dan Paham Situasi, https://www.merdeka.com/peristiwa/wakil-ketua-ma-yang-baru-diharapkan-tegas-dan-paham-situasi.html;
- 07 Februari 2023, PaKem UMI nilai sosok Wakil Ketua MA ideal harus berintegritas, https://www.antaranews.com/berita/3383523/pakem-umi-nilai-sosok-wakil-ketua-ma-ideal-harus-berintegritas?utm_medium=mobile;
- Rabu, 3 Mei 2023, Pengamat Usulkan Cawapres Berlatar Belakang Hukum Tata Negara, Nama Yusril Mencuat, https://www.tvonenews.com/berita/nasional/119473-pengamat-usulkan-cawapres-berlatar-belakang-hukum-tata-negara-nama-yusril-mencuat;
- Rabu, 3 Mei 2023, Pakar Nilai Yusril Pantas Dilirik sebagai Bakal Cawapres di Pilpres 2024, https://www.kompas.tv/article/403265/pakar-nilai-yusril-pantas-dilirik-sebagai-bakal-cawapres-di-pilpres-2024?medium=whatsapp&smid=3174eea956a4dbd6367a92be2a29d6b3;
- Rabu, 3 Mei 2023, Urai Masalah Bangsa, Pakar Usulkan Cawapres Berlatar Hukum Tata Negara, https://www.liputan6.com/pemilu/read/5276404/urai-masalah-bangsa-pakar-usulkan-cawapres-berlatar-hukum-tata-negara ;
- Rabu, 07 Juni 2023, Respons Denny Indrayana, Pakar: Pemakzulan Presiden Tidak Mudah, https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1049788/respons-denny-indrayana-pakar-pemakzulan-presiden-tidak-mudah;
- Rabu, 07 Juni 2023, Denny Indrayana Minta Jokowi Dimakzulkan, Pakar Hukum Tata Negara: Impeachment

Presiden Sangat Tidak Mudah, https://www.tvonenews.com/berita/nasional/128255-denny-indrayana-minta-jokowi-dimakzulkan-pakar-hukum-tata-negara-impeachment-presiden-sangat-tidak-mudah;

- Kamis, 08 Juni 2023, Tanggapi Denny Indrayana soal Pemakzulan Jokowi, Pakar: Not Easy and Complicated, https://www.viva.co.id/berita/politik/1607299-tanggapi-denny-indrayana-soal-pemakzulan-jokowi-pakar-not-easy-and-complicated;
- Kamis, 08 Juni 2023, Pakar Hukum: Pemakzulan Harus Beralas Hukum, Bukan Sangkaan Politis, https://news.detik.com/berita/d-6761170/pakar-hukum-pemakzulan-harus-beralas-hukum-bukan-sangkaan-politis;
- Sabtu, 15 Juli 2023, Gelar Hari Bhakti Adhyaksa, Kejati Maluku Hadirkan Fahri Bachmid, https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011774298/gelar-hari-bhakti-adhyaksa-kejati-maluku-hadirkan-fahri-bachmid;
- Sabtu, 15 Juli 2023, Gelar Hari Bhakti Adhyaksa, Kejati Maluku Hadirkan Fahri Bachmid, https://www.jakartatodaynews.com/berita/detail/gelar-hari-bhakti-adhyaksa-kejati-maluku-hadirkan-fahri-bachmid;
- Kamis, 10 Agustus 2023, Pakar Hukum Sarankan Amendemen UUD 1945 Usai Pemilu 2024", https://news.detik.com/berita/d-6868626/pakar-hukum-sarankan-amendemen-uud-1945-usai-pemilu-2024;
- Kamis, 10 Agustus 2023, Amendemen UUD 1945, Awas Buka Kotak Pandora Politik, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230810093912-32-984214/amendemen-uud-1945-awas-buka-kotak-pandora-politik;
- Jumat 11 Agustus 2023, HEADLINE: MPR Akan Usulkan Amandemen UUD Penundaan Pemilu di Masa Darurat, Skenarionya?, https://www.liputan6.com/news/read/5367292/headline-mpr-akan-usulkan-amandemen-uud-penundaan-pemilu-di-masa-darurat-skenarionya?utm_source=Mobile&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=Share_Top;
- Selasa, 22 Agu 2023, Urgensi MK Putus Gugatan UU Pemilu di Tengah Tahapan Politik 2024, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230822104430-12-988860/urgensi-mk-putus-gugatan-uu-pemilu-di-tengah-tahapan-politik-2024;
- Jumat, 25 Agustus 2023 , Fahri Bachmid Gugat UU Mahkamah Konstitusi soal Syarat Jadi Hakim MK, https://www.viva.co.id/berita/nasional/1630861-fahri-bachmid-gugat-uu-mahkamah-konstitusi-soal-syarat-jadi-hakim-mk;
- Kamis, 24 Agustus 2023 , Ahli Hukum Gugat UU MK Minta Usia Minimal Hakim Konstitusi 40 Tahun, https://www.tvonenews.com/amp/berita/nasional/147477-ahli-hukum-gugat-uu-mk-minta-usia-minimal-hakim-konstitusi-40-tahun;
- Sabtu, 2 September 2023, Fahri Bachmid Dorong Pembentukan Undang-Undang Transisi Kepresidenan RI, https://www.tvonenews.com/berita/nasional/149659-fahri-bachmid-dorong-pembentukan-undang-undang-transisi-kepresidenan-ri;
- Minggu, 3 September 2023, Pakar Tata Negara Usulkan Wacana 'RUU Transisi Kepresidenan, https://news.detik.com/pemilu/d-6910473/pakar-tata-negara-usulkan-wacana-ruu-transisi-kepresidenan ;
- Minggu, 3 September 2023, Pakar hukum dorong pembentukan RUU transisi kepresidenan, https://www.antaranews.com/berita/3709539/pakar-hukum-dorong-

pembentukan-ruu-transisi-kepresidenan;

- Kamis, 21 Septe,ber 2023, Fahri Bachmid Harap Prabowo Terapkan Konsep Meritokrasi Memilih Cawapres Bukan Sekedar Ban Serep, https://www.tribunnews.com/nasional/2023/09/21/fahri-bachmid-harap-prabowo-terapkan-konsep-meritokrasi-memilih-cawapres-bukan-sekedar-ban-serep;
- Kamis, 21 Septe,ber 2023, Fahri Bachmid Sebut Prabowo Perlu Pilih Teknokrat bukan Ban Serep, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/615426/fahri-bachmid-sebut-prabowo-perlu-pilih-teknokrat-bukan-ban-serep;
- Jumat, 22 September 2023, Pakar hukum sarankan Prabowo pilih sosok cawapres teknokrat, https://www.antaranews.com/berita/3738294/pakar-hukum-sarankan-prabowo-pilih-sosok-cawapres-teknokrat;
- Jumat, 22 September 2023, Prabowo Disarankan Pilih Yusril sebagai Bakal Cawapres, Ini Alasannya, https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1068204/prabowo-disarankan-pilih-yusril-sebagai-bakal-cawapres-ini-alasannya;
- Jumat, 22 September 2023, Prabowo Harus Berani Pilih Cawapres yang Bukan Semata-mata 'Ban Serep', https://www.viva.co.id/berita/politik/1639960-prabowo-harus-berani-pilih-cawapres-yang-bukan-semata-mata-ban-serep;
- Kamis, 5 Oktober 2023, Pakar Nilai Prabowo-Yusril Bakal Dwitunggal bak Soekarno-Hatta, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231005120954-37-1007449/pakar-nilai-prabowo-yusril-bakal-dwitunggal-bak-soekarno-hatta;
- Kamis, 5 Oktober 2023, Maraknya Deklarasi Capres Cawapres Prabowo-Yusril, Pakar : Bila Terwujud Itu Dwitunggal, Layaknya Soekarno-Hatta, https://www.tvonenews.com/berita/157284-maraknya-deklarasi-capres-cawapres-prabowo-yusril-pakar-bila-terwujud-itu-dwitunggal-layaknya-soekarno-hatta;
- Minggu, 15 Oktober 2023, Pakar Hukum Tata Negara: MK Tak Berwenang Putuskan Batas Usia Capres Cawapres, https://www.tvonenews.com/berita/nasional/159542-pakar-hukum-tata-negara-mk-tak-berwenang-putuskan-batas-usia-capres-cawapres;
- Minggu, 15 Oktober 2023, Besok MK Putuskan Batas Usia Capres-Cawapres, Begini Prediksi Paka Hukum Tata Negara, https://www.jawapos.com/nasional/013077243/besok-mk-putuskan-batas-usia-capres-cawapres-begini-prediksi-paka-hukum-tata-negara;
- Minggu, 15 Oktober 2023, Pakar Hukum Ungkap 3 Kemungkinan Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, https://www.viva.co.id/berita/nasional/1647279-pakar-hukum-ungkap-3-kemungkinan-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres;
- Minggu, 15 Oktober 2023, Soal Usia Minimal Cawapres, MK Bisa Saja Tambahkan Syarat Khusus Kepala Daerah, https://www.beritasatu.com/nasional/1072018/soal-usia-minimal-cawapres-mk-bisa-saja-tambahkan-syarat-khusus-kepala-daerah;
- Sabtu, 4 November 2023, Fahri Bachmid: Tak Tersedia Alat Konstitusional untuk Me-Review Produk Putusan MK Terkait Usia Capres-Cawapres, https://www.jawapos.com/nasional/013222434/fahri-bachmid-tak-tersedia-alat-konstitusional-untuk-me-review-produk-putusan-mk-terkait-usia-capres-cawapres?page=2;
- Senin, 6 November 2023, Daftar Lengkap Tim Kampanye Nasional

Prabowo-Gibran, Ada Reza Arap, https://www.detik.com/jateng/berita/d-7022294/daftar-lengkap-tim-kampanye-nasional-prabowo-gibran-ada-reza-arap;

- Selasa, 7 November 2023, Daftar Lengkap TKN Prabowo-Gibran, dari Wantimpres hingga Artis https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231107083456-617-1020834/daftar-lengkap-tkn-prabowo-gibran-dari-wantimpres-hingga-arti;
- Minggu, 10 Desember 2023, Prabowo Gibran Tunjuk Yusril dan Fahri Bachmid Hadapi Gugatan Patra M Zen di PN Jakpus, https://www.harianterbit.com/megapolitan/27411154958/prabowo-gibran-tunjuk-yusril-dan-fahri-bachmid-hadapi-gugatan-patra-m-zen-di-pn-jakpus;
- Minggu, 10 Desember 2023, Hadapi Gugatan Patra M Zen, Prabowo-Gibran Tunjuk Yusril dan Fahri Bachmid, https://harian.fajar.co.id/2023/12/10/hadapi-gugatan-patra-m-zen-prabowo-gibran-tunjuk-yusril-dan-fahri-bachmid/;
- Senin, 11 Desember 2023, Prabowo-Gibran Tunjuk Yusril Ihza Mahendra dan Fahri Bachmid Hadapi Gugatan Patra M Zen, https://hukum.rakyat.news/read/707357/prabowo-gibran-tunjuk-yusril-ihza-mahendra-dan-fahri-bachmid-hadapi-gugatan-patra-m-zen;
- Selasa, 16 Januari 2024, IST Fahri Bachmid: *Isu Pemakzulan Presiden Hanya imajiner, Tidak Mempunyai Basis constitusional,* https://www.tvonenews.com/berita/181571-fahri-bachmid-isu-pemakzulan-presiden-hanya-imajiner-tidak-mempunyai-basis-constitusional;
- Selasa, 16 Januari 2024, Pakar: Isu Pemakzulan Presiden Hanya Imajiner, Tak Punya Basis Konstitusional, https://www.beritasatu.com/nasional/2794521/pakar-isu-pemakzulan-presiden-hanya-imajiner-tak-punya-basis-konstitusional;
- Minggu, 4 Februari 2024 , Pratikno Dituding Operator, Pakar Hukum Tata Negara: Itu Keliru Pahami Tugas Mensesneg!, https://www.beritasatu.com/nasional/2797837/pratikno-dituding-operator-pakar-hukum-tata-negara-itu-keliru-pahami-tugas-mensesneg ;
- Senin, 05 Februari 2024, Pakar Hukum Sebut Status Pendaftaran Prabowo-Gibran Tetap Konstitusional, https://news.detik.com/pemilu/d-7179011/pakar-hukum-sebut-status-pendaftaran-prabowo-gibran-tetap-konstitusional;
- Kamis, 22 Feb 2024, Pakar Tata Negara Nilai Usulan Hak Angket Pilpres Absurd, https://news.detik.com/berita/d-7207030/pakar-tata-negara-nilai-usulan-hak-angket-pilpres-absurd-ini-penjelasannya;
- Jumat, 23 Februari 2024, Soal Hak Angket DPR untuk Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Pakar Hukum: Penggunaannya Cenderung Absurd, TRIBUN-VIDEO.COM https://www.youtube.com/watch?v=PPA32OCnJOY;
- Rabu, 06 Mar 2024, Pakar Hukum Tata Negara: Konstitusi Tak Beri Mandat DPD Mengawasi Pemilu, https://news.detik.com/pemilu/d-7227905/pakar-hukum-tata-negara-konstitusi-tak-beri-mandat-dpd-mengawasi-pemilu;
- Kamis, 18 April 2024, Fahri Bachmid : Fenomena Kontemporer Amicus Curiae MK, Bentuk lain dari Intervensi Peradilan, https://www.tvonenews.com/berita/nasional/202924-fahri-bachmid-fenomena-kontemporer-amicus-curiae-mk-bentuk-lain-dari-intervensi-peradilan;
- Minggu, 21 April 2024, TKN: MK Tak Boleh Putuskan Sengketa Pilpres dengan Opini, Harus Fakta Hukum,

https://news.detik.com/pemilu/d-7302989/tkn-mk-tak-boleh-putuskan-sengketa-pilpres-dengan-opini-harus-fakta-hukum;

- Jumat, 10 Mei 2024 . Fahri Bachmid: Keniscayaan Konstitusional Revisi UU Kementerian Negara dan Penataan Kabinet, https://www.beritasatu.com/nasional/2815887/fahri-bachmid-keniscayaan-konstitusional-revisi-uu-kementerian-negara-dan-penataan-kabinet/amp;
- Sabtu 10 Mei 2024 . Pakar Hukum: Penambahan Jumlah Kementerian Keniscayaan Konstitusional, https://www.viva.co.id/berita/politik/1712907-pakar-hukum-penambahan-jumlah-kementerian-keniscayaan-konstitusional

Diperbaharui : 25 Juli 2024

DR. FAHRI BACHMID, S.H.,M.H.

(Advokat & Dosen Hukum Tata Negara /Konstitusi dan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia)